



KEPUTUSAN KEPALA DESA KERTAYASA
KECAMATAN SINDANGAGUNG KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS TIM PENGGERAK PKK
DESA KERTAYASA KECAMATAN SINDANGAGUNG KABUPATEN KUNINGAN
Masa Bhakti 2020-2027

KEPALA DESA KERTAYASA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 580) perlu mengangkat Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK) Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan untuk menjamin adanya kepastian hukum, maka pengangkatannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 yang diubah ke Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2019 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 yang diubah ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 yang tentang SOTK Pemerintah Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 yang diubah ke dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa;
29. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan

- Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
30. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 31. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
 32. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa;
 33. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 34. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
 35. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 39. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
 40. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 41. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Badan permusyawaratan Desa (BPD);
 42. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 43. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;
 44. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 49 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 45. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas Desa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;
 46. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Panduan Pelaksanaan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan;
 47. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kuningan;
 48. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 36 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Stunting di Kabupaten Kuningan;
 49. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 84 Tahun 2019

- tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
50. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang /Jasa di Desa;
 51. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 52. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
 53. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 14 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa;
 54. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 250 Tahun 2022 tentang Mekanisme Penetapan Warga Masyarakat Kabupaten Kuningan yang Masuk Kategori Miskin;
 55. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 367 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Sistem Informasi Desa Menuju Desa Cerdas (Smart Village) di Kabupaten Kuningan;
 56. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 57. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Untuk Pengelolaan Keuangan Desa;
 58. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penetapan, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Alokasi Dana Desa;
 59. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 31 Tahun 2024 tentang Manajemen Perangkat Desa;
 60. Peraturan Desa Kertayasa Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 61. Peraturan Desa Kertayasa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa;
 62. Peraturan Desa Kertayasa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Tahun 2020 - 2027;
 63. Peraturan Desa Kertayasa Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Kertayasa Tahun Anggaran 2025;
 64. Peraturan Desa Kertayasa Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Kertayasa Tahun Anggaran 2025;
 65. Peraturan Kepala Desa Kertayasa Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Kertayasa Tahun Anggaran 2025.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengangkat Pengurus Tim Penggerak PKK Desa Kertayasa Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Masa Bhakti kepengurusan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah selama 6 (enam) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini.
- KETIGA** : Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan

KEEMPAT : penuh tanggung jawab.
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan
diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Kertayasa
Pada Tanggal : 6 Januari 2025

KEPALA DESA KERTAYASA



Tembusan :

1. Yth. Bupati Kuningan
2. Yth. Kepala DPMD Kab. Kuningan
3. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kuningan
4. Yth. Camat Kecamatan Sindangagung
5. Yth. Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan Sindangagung
6. Yth. Ketua BPD Desa Kertayasa
7. Arsip.

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Kertayasa
Nomor : 6 Tahun 2025
Tanggal : 6 Januari 2025
Tentang : Pengangkatan Pengurus
Tim Penggerak PKK
Desa Kertayasa
Kec. Sindangagung
Kab. Kuningan
Masa Bhakti 2020-2027

PENGURUS TIM PENGGERAK PKK
DESA KERTAYASA
KECAMATAN SINDANGAGUNG KABUPATEN KUNINGAN
Masa Bhakti 2020-2027

Dewan Penyantun : KEPALA DESA
Ketua : Ny. Hj. EVA NUR LATIFAH, S.Pd.I
Wakil Ketua : Ny. ANNA SITI NURJANAH
Sekretaris : Ny. RATIH
Bendahara : Ny. EVA RISKANA

POKJA I		POKJA II	
Ketua	: ERNI SUSILAWATI	Ketua	: TITIN NURJANAH
Sekretaris	: SITI NUR ZANNAH	Sekretaris	: LIA DAHLIA
Bendahara	: FITRI ERNAWATI	Bendahara	: EMOH
Anggota	: UUN UNIRAH PARTI SUPARTI SITI JUHENA	Anggota	: EVI SILVIA NINA MISRINA DEWI MARTINI
POKJA III		POKJA IV	
Ketua	: NURUL FITRI	Ketua	: CICIH SOPIANI
Sekretaris	: EVA SOPIANAH	Sekretaris	: YOYOH
Bendahara	: TARSIH	Bendahara	: EUIS MARISSA B, S.Keb
Anggota	: MARKUNAH ACIH SUKAESIH SALTI	Anggota	: MAYA DAMAYANTI ENI NURAENI ASTIYATULHUDA IIS ISWATI

